

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

TRIWULAN III 2026

PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

Jalan Sultan Trenggono No. 27 Demak – Jawa Tengah

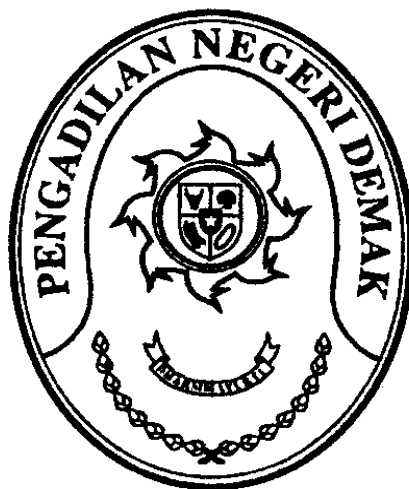
Telp (0291) 685771

www.pn-demak.go.id

LAPORAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik



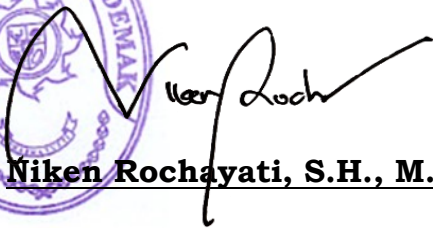
LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Disahkan di Demak

Pada hari : Kamis, 01 Oktober 2026

Ketua Pengadilan Negeri Demak Kelas IB



Niken Rochayati, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat, karunia serta taufik dan hidayah-Nya, kami dapat menyusun Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pengadilan Negeri Demak Kelas IB periode Triwulan III Tahun 2026.

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB sangat membutuhkan informasi sebagai umpan balik dari pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan kepada masyarakat. Atas dasar itu Pengadilan Negeri Demak Kelas IB mengadakan Survei Kepuasan Masyarakat. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Kegiatan survei Kepuasan Masyarakat periode Triwulan III Tahun 2026 ini dilaksanakan pada bulan Juli 2026 sampai dengan bulan September 2026. Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat, kesimpulan dan rekomendasi serta beberapa catatan berdasarkan hasil pelaksanaan survei kami sampaikan dalam laporan ini agar dapat menjadi masukan untuk pelayanan publik di Pengadilan Negeri Demak Kelas IB.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat periode Triwulan III Tahun 2026. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam proses pelaksanaan survei dan pembuatan laporan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima untuk perbaikan. Semoga laporan ini berguna bagi semua pihak, khususnya Pengadilan Negeri Demak Kelas IB dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Demak Kelas IB.

Demak, 01 Oktober 2026

Tim Survei

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Demak Kelas IB.

Sasaran yang ingin dicapai pada survei ini adalah mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan, mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik, mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan berisi capaian nilai setiap unsur pelayanan pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB. Untuk laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) periode Triwulan III Tahun 2026 nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pengadilan Negeri Demak Kelas IB adalah 98,45 atau kategori sangat baik. Nilai tertinggi unsur layanan adalah unsur Persyaratan (3,954), sedangkan nilai terendahnya unsur Prosedur pada interval 3,931.

Bahwa Pengadilan Negeri Demak Kelas IB dalam proses pelaksanaan maupun penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan secara mandiri. Dari hasil survei yang diperoleh kemudian ditindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan terhadap unsur penilaian yang masih dianggap kurang baik oleh masyarakat.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

RINGKASAN EKSEKUTIFiv

BAB I PENDAHULUAN.....1

 A. Latar Belakang1

 B. Tujuan2

 C. Sasaran2

 D. Prinsip2

 E. Ruang Lingkup.....3

 F. Unsur SKM3

 G. Manfaat4

 H. Pengertian Umum4

BAB II METODE SURVEI.....6

 A. Periode Survei6

 B. Metode penelitian.....6

BAB III PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI7

 A. Pelaksanaan.....7

 1. Pelaksana survei7

 2. Tahapan survei7

 B. Teknik Survei Kepuasan Masyarakat.....7

 C. Penyusunan Laporan8

BAB IV PENYUSUNAN DAN PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT9

 A. Persiapan Survei.....9

 1. Penetapan Pelaksana9

 2. Penyiapan Bahan Survei9

 3. Bentuk Jawaban12

 B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data12

 1. Penetapan Jumlah Responden12

 2. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data13

 3. Pelaksanaan Pengumpulan Data13

 C. Pengolahan Data13

 1. Pengukuran Skala Likert13

 D. Pengolahan Data Survei14

 2. Pengolahan secara manual14

 3. Pengujian Kualitas Data15

4. Penyusunan Jadwal	15
BAB V HASIL PENGUKURAN	16
A. Hasil Penyusunan Indeks	16
B. Evaluasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	18
BAB VI PENUTUP	20
A. Kesimpulan	20
B. Rekomendasi	20
LAMPIRAN.....	21
DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN III 2026.....	21
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN III 2026	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB merupakan sebuah Lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Kabupaten Demak. Pengadilan Negeri Demak Kelas IB bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum). Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum).

Tingkat keberhasilan Pengadilan Negeri Demak Kelas IB dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya tersebut sangat ditentukan pada tingkat kualitas pelayanan publik yang disediakan. Salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut adalah dengan melakukan evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk menilai kinerja pelayanan yang disediakan oleh setiap bagian yang ada di Pengadilan Negeri Demak Kelas IB.

Berdasarkan hal tersebut, untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik Pengadilan Negeri Demak Kelas IB melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui metode survei sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

B. Tujuan

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Demak Kelas IB.

C. Sasaran

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Demak Kelas IB.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Demak Kelas IB.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Demak Kelas IB.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Pengadilan Negeri Demak Kelas IB.

D. Prinsip

Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

1. **Transparan**
Hasil survei kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
2. **Partisipatif**
Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat harus melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.
3. **Akuntabel**
Hal-hal yang diatur dalam Survei Kepuasan Masyarakat harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.
4. **Berkesinambungan**
Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.
5. **Keadilan**
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

6. Netralitas

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.

E. Ruang Lingkup

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik meliputi Metode Survei, Pelaksanaan dan Teknik Survei, Langkah-Langkah Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Langkah-Langkah Pengolahan Data, Pemantauan, Evaluasi dan Mekanisme Pelaporan Hasil Penilaian Indeks Survei Kepuasan Masyarakat, Analisa Hasil Survei dan Rencana Tindak Lanjut.

F. Unsur SKM

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif *)

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana **)

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana **)

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Catatan:

*) Unsur 4, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen). Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh UU dinyatakan gratis.

**) Unsur 6 dan Unsur 7, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis website.

G. Manfaat

Dengan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Demak Kelas IB secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

H. Pengertian Umum

Sesuai dengan pedoman umum penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terdapat beberapa pengertian yang perlu dijelaskan, yaitu :

1. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).
3. Unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.

4. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat adalah unsur-unsur yang menjadi indikator pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh pemberi layanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan), atau 6 (enam) bulan (semester) atau minimal 1 (tahun) sekali.
6. Lembaga lain adalah lembaga pemerintah atau nonpemerintah yang secara hukum berkedudukan di Indonesia yang memiliki kredibilitas dan akreditasi yang jelas dibidang penelitian dan survei. Misalnya lembaga penelitian yang ada di universitas/ perguruan tinggi.
7. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
9. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.
10. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penyusunan survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja unit pelayanan
11. Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan.
12. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah.
14. Instansi Pemerintah adalah Instansi pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk BUMN/BUMD dan BHMN.

BAB II

METODE SURVEI

A. Periode Survei

Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Survei ini, dapat dilakukan secara tetap dengan jangka waktu (periode) tertentu. Survei dapat dilakukan setiap 3 bulanan (triwulan), 6 bulanan (semester) atau 1 (satu) tahun. Penyelenggara pelayanan publik setidaknya minimal melakukan survei 1 (satu) tahun sekali.

Survei ini bersifat komprehensif dan hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (*trend*) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal penyelenggara menggunakan metode survei ini, maka metode ini harus dinyatakan di dalam laporan. Pengolahan dan analisa hasil survei agar mengikuti cara pengolahan data dan kluster penilaian sesuai dengan kaidah pengolahan survei.

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam bidang peradilan melakukan survei secara berkala dalam jangka waktu/periode 3 (tiga) bulan sekali.

B. Metode penelitian

Untuk melakukan survei secara periodik Pengadilan Negeri Demak Kelas IB menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala *Likert* adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala *Likert* responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

BAB III

PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI

A. Pelaksanaan

1. Pelaksana survei

- a. Pelaksana survei adalah setiap unit penyelenggara pelayanan yang terdapat pada lembaga negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
- b. Pelaksanaan survei dilaksanakan sendiri oleh Pengadilan Negeri Demak Kelas IB.

2. Tahapan survei

Pelaksanaan SKM terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah, sebagai berikut:

- 1) Menyusun instrumen survei;
- 2) Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
- 3) Menentukan responden;
- 4) Melaksanakan survei;
- 5) Mengolah hasil survei;
- 6) Menyajikan dan melaporkan hasil.

Tahapan penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik ini didasarkan pada metode dan teknik yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Teknik Survei Kepuasan Masyarakat

Untuk melakukan survei dapat menggunakan teknik survei, antara lain:

1. Kuesioner dengan wawancara tatap muka;
2. Kuesioner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui surat;
3. Kuesioner elektronik (*e-survei*);
4. Diskusi kelompok terfokus;
5. Wawancara tidak berstruktur melalui wawancara mendalam.

Bahwa dalam pelaksanaan survei ini, Pengadilan Negeri Demak Kelas IB menggunakan teknik survei kuesioner melalui aplikasi si-SUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Badan Peradilan Umum).

C. Penyusunan Laporan

Laporan Hasil Survei ini dimaksudkan sebagai salah satu media atau alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik secara bertahap, konsisten, berkesinambungan berdasarkan informasi yang dimiliki.

1. Materi Pokok Laporan SKM

Materi pokok dalam Laporan SKM mencakup: latar belakang masalah, tujuan SKM, Metode, tim SKM dan jadwal pelaksanaan dan Tindak lanjut SKM, sebagai berikut:

1) Pendahuluan: latar belakang masalah, tujuan SKM, metode, tim SKM dan jadwal pelaksanaannya SKM:

- a. Latar belakang masalah memuat berbagai hal penyebab munculnya problematika dalam penyusunan SKM, baik ditinjau dari komponen yang akan disurvei dan dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b. Tujuan SKM berisi tentang hasil akhir yang akan dicapai dari hasil SKM yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan IKM.
- c. Metode memuat karakteristik populasi, keterwakilan anggota sampel, dan jumlah responden, selain itu disajikan juga jumlah kuesioner yang berhasil dikumpulkan kembali, dan jumlah kuesioner yang dapat diproses lebih lanjut atau diolah.
- d. Tim SKM terdiri dari Ketua, Anggota dan Sekretariat SKM.
- e. Jadwal SKM memuat kegiatan dan waktu pelaksanaan survei.

2) Analisis

Analisis meliputi data kuesioner, perhitungan, dan deskripsi hasil analisis. Hasil analisis harus memberikan penjelasan atau pemahaman mengenai berbagai faktor pemicu kelemahan dan/atau kelebihan pada setiap komponen yang diukur. Selain itu, hasil analisa survei tersebut dapat dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya.

3) Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran/rekomendasi. Kesimpulan berisi tentang intisari hasil SKM, baik bersifat negatif maupun positif. Sedangkan saran/rekomendasi memuat masukan perbaikan secara konkrit pada masing-masing komponen yang menunjukkan kelemahan. Selain hal-hal pokok sebagaimana telah diuraikan, dalam laporan juga memuat ringkasan eksekutif (*executle summary*).

BAB IV
PENYUSUNAN DAN PENGOLAHAN DATA
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

A. Persiapan Survei

1. Penetapan Pelaksana

Pelaksanaan survei dilaksanakan secara swakelola, dengan membentuk Tim penyusunan survei kepuasan masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Demak Kelas IB Nomor : 107/KPN.W12-U23/HK1.2.5/IX/2026 Tentang Penunjukan Tim Penyusun Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), Dan Survei Harian (SH) Pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB;

Pembentukan Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB yang terdiri dari:

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Niken Rochayati, S.H., M.H.	Ketua	Penanggungjawab
2	Achmad Iyud Nugraha, SH.,M.H	Wakil Ketua	Koordinator
3	Ngabdul Ngayis, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
4	Lisnawati, A.Md.	Klerek – Dokumentalis Hukum	Anggota
5	Samsul Komarudin, S.H.	Operator – Penata Layanan Operasional	Anggota
6	Yahya Arif	Operator – Penata Layanan Operasional	Anggota

2. Penyiapan Bahan Survei

a. Kuesioner

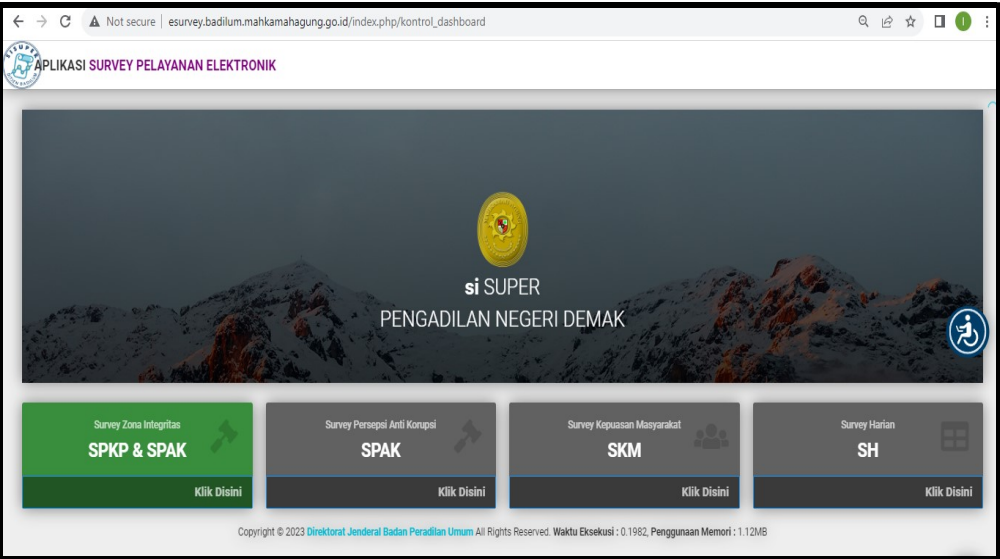
Dalam menyusun Survei Kepuasan Masyarakat digunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner sudah disusun dalam aplikasi si-SUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Badan Peradilan Umum).

b. Bagian Kuesioner

Bagian kuesioner secara umum, terbagi dalam :

1) Bagian Pertama

Pada bagian pertama berisikan dashboard responden, nama aplikasi dan nama instansi yang dilakukan survei.



Gambar 1. Halaman Depan Aplikasi si-SUPER

2) Bagian Kedua

Pada bagian kedua dapat berisikan identitas responden, antara lain: jenis kelamin, kaitan dengan persepsi (penilaian) responden terhadap layanan yang diperoleh. Selain itu dapat juga ditambahkan kolom waktu/jam responden saat disurvei.

Gambar 2. Bagian Kuesioner (Data Responden)

3) Bagian Ketiga

Pada bagian ini berisikan jenis layanan yang telah diterima oleh responden. Adapun jenis layanan yang ada di Pengadilan Negeri Demak Kelas IB adalah layanan Pidana, layanan Perdata, layanan Hukum/Informasi, layanan Administrasi Umum, layanan e-Court dan layanan Inzage.

Dashboard

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Beranda / SKM / Detil

Survey Kepuasan Masyarakat | Surveillance

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada peraturan KEMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017.

1 Data Responden

Nama serta detil responden

2 Layanan

Layanan

3 Form Kuesioner

Isian form kuesioner SKM

4 Kesan & pesan

mohon isi kesan dan pesan Anda

Layanan yang Anda dapatkan

Jenis Layanan *

Pilih Layanan Yang Didapat

Pilih Layanan Yang Didapat

Layanan Pidana

Layanan Perdata

Layanan Hukum / Informasi

Layanan Administrasi Umum

Layanan Niaga

Layanan PHI

Layanan Tipikor

Layanan E-Court

Layanan Integre

Layanan Perikanan

Pernah Menerima Layanan Ini Sebelumnya ? *

Kembali

Selanjutnya

Gambar 3. Bagian Kuesioner (Data Layanan)

4) Bagian Keempat

Dashboard

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Beranda / SKM / Detil

Survey Kepuasan Masyarakat | Surveillance

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada peraturan KEMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017.

1 Data Responden

Nama serta detil responden

2 Layanan

Layanan

3 Form Kuesioner

Isian form kuesioner SKM

4 Kesan & pesan

mohon isi kesan dan pesan Anda

1

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan ?

☐ Tidak Sesuai

☐ Kurang Sesuai

☐ Sesuai

☐ Sangat Sesuai

2

Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ?

☐ Tidak Mudah

☐ Kurang Mudah

☐ Mudah

☐ Sangat Mudah

3

Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ?

☐ Tidak Cepat

☐ Kurang Cepat

☐ Cepat

☐ Sangat Cepat

Gambar 4. Bagian Kuesioner (Daftar Pertanyaan)

Pada bagian ini berisikan daftar pertanyaan yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Pertanyaan yang terstruktur berisikan jawaban dengan pilihan berganda (pertanyaan tertutup).

5) Bagian Kelima

Pada bagian ini berisikan jawaban tidak terstuktur (pertanyaan terbuka) berupa pertanyaan dengan jawaban bebas, dimana responden dapat menyampaikan pendapat, saran, kritik dan apresiasi.

Survey Kepuasan Masyarakat | Surveillance

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada peraturan KEMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017.

1 Data Responden

Nama serta detil responden

2 Layanan

Layanan

3 Form Kuesioner

Isian form kuesioner SKM

4 Kesan & pesan

mohon isi kesan dan pesan Anda

Mohon untuk mengisi kesan dan pesan Anda untuk meningkatkan pelayanan kami disini...

Terima kasih karena telah mengisi form survey kepuasan masyarakat pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Di Ungaran.
Klik Kotak dibawah 'Saya bukan robot' sebagai verifikasi Anda sebagai manusia biasa bukan sebagai bot kemudian klik tombol SIMPAN DATA dibawah untuk menyimpan data survey Anda.

☐ Saya bukan robot



Simpan Data

Gambar 5. Bagian Kuesioner (Kesan & Pesan)

3. Bentuk Jawaban

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
- 2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
- 3) baik, diberi nilai 3;
- 4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

- 1) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
- 2) Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
- 3) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
- 4) Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

1. Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih masyarakat pengguna layanan pengadilan.

Pengguna layanan didefinisikan sebagai orang yang sedang atau pernah mendapat pelayanan dari Pengadilan Negeri Demak Kelas IB. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), besaran populasi dan sampel menggunakan tabel sampel dari **Morgan and Krejcie (Lampiran II)** dimana ditentukan populasi sebanyak lebih dari 100.000 (seratus ribu) dengan responden terpilih sebanyak 583 (lima ratus delapan puluh tiga) responden.

2. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di Pengadilan Negeri Demak Kelas IB mulai bulan Juli 2026 sampai dengan bulan September 2026.

3. Pelaksanaan Pengumpulan Data

a) Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, perlu ditanyakan kepada masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang telah ditetapkan. Pengadilan Negeri Demak menetapkan 9 (sembilan) unsur pelayanan yang akan ditanyakan kepada seluruh responden, yaitu unsur Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Kualitas Sarana dan Prasarana serta Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

b) Pengisian kuesioner

Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan langsung melalui aplikasi si-SUPER Badilum.

C. Pengolahan Data

Pengolahan data masing-masing metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan sebagai berikut:

1. Pengukuran Skala Likert

a) Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai.

Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

X = jumlah unsur yang disurvei

N = bobot nilai per unsur

Contoh : jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM \text{ Unit pelayanan} \times 25$$

Tabel I
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

D. Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1. Pengolahan dengan komputer
 - Data *entry* dan penghitungan indeks dapat dilakukan dengan program komputer/sistem data base.
- 2. Pengolahan secara manual
 - a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U1) sampai dengan unsur X (UX);
 - b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:
 - 1) Nilai rata-rata per unsur pelayanan.
Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.
Contoh : Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan

dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

2) Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur

3. Pengujian Kualitas Data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

4. Penyusunan Jadwal.

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat diperkirakan memerlukan waktu selama 50 (lima puluh) hari kerja dengan rincian sebagai berikut:

- a. Persiapan (Pembentukan Tim Survei, penyusunan kuesioner), 2 (dua) hari kerja;
- b. Pelaksanaan pengumpulan data, 45 (empat puluh lima) hari kerja;
- c. Pengolahan data indeks, penyusunan dan pelaporan hasil 3 (tiga) hari kerja;

BAB V
HASIL PENGUKURAN

A. Hasil Penyusunan Indeks

Data akhir kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat dari setiap unit pelayanan Pengadilan Negeri Demak Kelas IB, disusun dengan materi utama sebagai berikut:

1. Indeks setiap unsur pelayanan

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11 (untuk 9 unsur). Adapun nilai unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh setiap unsur pelayanan pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel II		
Nilai Unsur Survei Kepuasan Masyarakat		
No	Unsur SKM	Nilai Unsur SKM
1.	Persyaratan	3,954
2.	Prosedur	3,931
3.	Waktu Pelayanan	3,931
4.	Biaya/Tarif	3,931
5.	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3,938
6.	Kompetensi pelaksana	3,937
7.	Perilaku pelaksana	3,937
8.	Sarana dan prasarana	3,935
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,949

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$(3,954 \times 0,11) + (3,931 \times 0,11) + (3,931 \times 0,11) + (3,931 \times 0,11) + (3,938 \times 0,11) + (3,937 \times 0,11) + (3,937 \times 0,11) + (3,935 \times 0,11) + (3,949 \times 0,11) =$$

Nilai Indeks (X) adalah **3,938**

Dengan demikian nilai indeks (X) unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar
= 3,938 x 25
= 98,45

b) Mutu pelayanan = **A**

c) Kinerja unit pelayanan = **Sangat Baik**

2. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan kepada unsur yang mempunyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu diperbaiki, sedangkan unsur yang mempunyai nilai yang tinggi minimal harus tetap dipertahankan.

Tabel I
Nilai Indeks Survei Kepuasan Masyarakat

No	Unsur SKM	NRR per Unsur	NRR tertimbang per Unsur
1.	Persyaratan	3,954	0,439
2.	Prosedur	3,931	0,437
3.	Waktu Pelayanan	3,931	0,437
4.	Biaya/Tarif	3,931	0,437
5.	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3,938	0,438
6.	Kompetensi pelaksana	3,937	0,437
7.	Perilaku pelaksana	3,937	0,437
8.	Sarana dan prasarana	3,935	0,437
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,949	0,439
Nilai Indeks			3,938
Nilai Indeks setelah dikonversi (NI x 25)			98,45

Dari hasil penilaian masyarakat terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan diperoleh unsur yang terendah sebagai berikut:

1. Biaya/Tarif;
2. Waktu Pelayanan;
3. Prosedur.

B. Evaluasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat periode Triwulan III Tahun 2026 di lingkup Pengadilan Negeri Demak Kelas IB, terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi diantaranya:

1. Perlunya pemberian pemahaman kepada responden oleh petugas survei terkait maksud setiap pertanyaan dalam Survei Kepuasan Masyarakat;
2. Masyarakat cenderung memberikan jawaban yang normatif ketika mengisi kuesioner, sehingga perlu dicoba pelaksanaan survei dengan teknik wawancara tatap muka;

Tabel I
RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN SKM
3 (tiga) UNSUR TERENDAH

NO	PRIORITAS UNSUR	PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	Biaya/Tarif	Melakukan sosialisasi dan publikasi tarif resmi pelayanan melalui PTSP dan media informasi Pengadilan Negeri Demak	2 bulan (Oktober-November 2026)	Panitera, Sekretaris, Para Panmud, dan Para Kasub
2	Waktu Pelayanan	- Melakukan pembinaan dan pengarahan kepada petugas PTSP; - Melakukan evaluasi terhadap waktu penyelesaian setiap jenis layanan, meningkatkan koordinasi petugas, serta melakukan monitoring agar pelayanan diberikan sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan.	2 bulan (Oktober-November 2026)	Panitera, Sekretaris, Para Panmud, dan Para Kasub
3	Prosedur	Melakukan sosialisasi dan publikasi informasi mengenai alur, persyaratan, dan tahapan pelayanan melalui media informasi dan petugas PTSP	2 bulan (Oktober-November 2026)	Panitera, Sekretaris, Para Panmud, dan Para Kasub

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dalam bahasan hasil survei, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum kualitas pelayanan dalam unit pelayanan Pengadilan Negeri Demak dipersepsikan **Sangat Baik** oleh para pengguna layanan. Hal ini terlihat dari hasil/pencapaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh berada pada nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dari 9 (sembilan) unsur pelayanan adalah **98,45**.
2. Unsur **Biaya/Tarif, Waktu Pelayanan, dan Prosedur** merupakan unsur yang nilai pencapaian terendah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pengadilan Negeri Demak, khususnya terhadap 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah yaitu Biaya/Tarif, Waktu Pelayanan, dan Prosedur, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Biaya/Tarif

Melakukan evaluasi dan memastikan informasi tarif pelayanan selalu tersedia, jelas, mudah diakses, dan diperbarui pada PTSP serta media informasi Pengadilan Negeri Demak.

2. Waktu Pelayanan

Meningkatkan kedisiplinan dan koordinasi petugas PTSP serta melakukan monitoring secara berkala terhadap waktu penyelesaian pelayanan agar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

3. Prosedur

Meningkatkan sosialisasi dan publikasi mengenai alur, persyaratan, dan tahapan pelayanan serta memastikan petugas PTSP memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.

LAMPIRAN

DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN III 2026

No	Responden	Pelayanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	Nanang Nasir	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Achmad Sulchan	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	Sufa'ah	Layanan Administrasi Umum Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	Sholahudin	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	Chadliri	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	Setya Hermawan	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	M.Andi Ari S	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	Kholif Fadilla P	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	Nur Kholis	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	Fathullah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	Hammam Faris Kurniawan	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	Chadzirin	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	Nur Afifah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	Ayu Indriani	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	Tamzis Fadlil	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	Ahmad Muzer	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	Bety Sarinah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	M.Sopii	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	Nadya Yunia Maharani	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	Linda Wijayanti	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	Siti Murtiah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	Matroni	Layanan Pidana	3	3	3	3	3	3	3	3	3
23	Ifah Khoiriyah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	Rahma Danti Harum K.P	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	Siti Alinatun Nihayah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	Solikin	Layanan Pidana	3	4	4	4	4	4	4	4	4
27	Sunarti	Layanan Pidana	3	3	3	3	3	3	3	3	3
28	M.Zaki	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	Nabila Amalia S	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	Aditya Dwi A	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	Edy Suyanto	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	Sonia Mulyadi	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	Carawidianto Putra Abdul A	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	Fitriana	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	Suwandi	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	Supiah	Layanan Pidana	3	3	3	3	3	3	3	3	3
37	Indariyah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	Erika Arvista W	Layanan Pidana	3	3	4	4	4	4	4	4	4
39	Irwan Suseno	Layanan Pidana	3	3	3	3	3	3	3	3	3
40	Sri Rahayu	Layanan Pidana	3	3	3	3	3	3	3	3	3

41	Heri Suyanto	Layanan Pidana	4	3	3	3	3	3	3	3	3
42	Yudha Galuh R	Layanan Pidana	3	3	3	3	3	3	3	3	4
43	Nurhayati	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	Novi Febriyanti	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	Dara Gadis Jelita	Layanan Pidana	3	3	3	3	3	3	3	3	3
46	Choirun Nidzar A	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	Rizky Tri Gunawan	Layanan Pidana	4	4	4	3	4	4	4	3	4
48	Ahmad Sabila Rosat	Layanan Pidana	3	3	3	4	4	4	4	4	4
49	Dimas Adrian Angga S	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
50	Muhri	Layanan Pidana	3	3	4	3	4	4	4	4	4
51	Apreh Santoso	Layanan Pidana	4	4	3	3	4	3	4	3	4
52	Aditya Dwi A	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	Agnes Murtiany	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
54	Santika Dewi Wahyuni	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	Nurhayati	Layanan Perdata	3	3	3	3	3	3	3	3	3
56	Andriyanto	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
57	Paulina Chrisanty Situmeang	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
58	Sukarmin	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
59	Rizky Tri	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
60	Nando Dwi Cahyo	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
61	Nurhayati	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
62	Wahyu Wulandari	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
63	Poniyati	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	Edy Suyanto	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
65	M.Yazid	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
66	M.Yazid	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
67	Abdul Manan	Layanan Pidana	3	4	4	4	4	4	4	4	4
68	Dwi Lestyani	Layanan Pidana	3	3	3	3	3	3	3	3	3
69	Ahmad Muhyiddin	Layanan Perdata	4	3	3	3	3	3	3	3	3
70	Indah Wahyu Ningsih	Layanan Pidana	4	3	3	3	3	3	3	3	3
71	Ali Rohmad	Layanan Pidana	4	3	3	3	3	3	3	3	3
72	Y.Joko Prastiyanto	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
73	Ahmad Subkhi	Layanan Administrasi Umum Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4
74	Christiana Sugiyanto	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
75	Pipit Suroso	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
76	Sonia Mulyadi	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
77	Ayu Rachmawati	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
78	Jawaroh	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
79	TR Puji Lestari	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
80	Abdul Manan	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
81	Kanti Prihatiari	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
82	Sukarmin	Layanan Pidana	4	4	3	3	3	3	3	3	3

83	Novi Febriyanti	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
84	Dara Gadis Jelita	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
85	Nurhayati	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
86	Eni Sapitri	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
87	Fitriana	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
88	Murtiningsih	Layanan Pidana	3	3	3	3	3	3	3	3	3
89	Indariyah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
90	Muslim	Layanan Pidana	3	3	3	4	4	4	4	4	4
91	Chintya Indhika Putri	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
92	Evaika	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
93	Zamroriroh	Layanan Pidana	3	3	3	3	3	3	3	3	3
94	Supardi	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
95	Kasno	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
96	Adhie Irawan	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
97	Zahrotul Anisa	Layanan Perdata	4	3	3	3	3	3	3	3	3
98	Zanuar Alifus Siyam	Layanan Perdata	3	4	4	4	4	4	4	4	4
99	Supardi	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
100	Naufal Fiki Azmi	Layanan Administrasi Umum Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4
101	Adhie Irawan	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
102	Novi Febriyanti	Layanan Pidana	3	3	3	3	3	3	3	3	3
103	Durrotun Nasichin	Layanan Administrasi Umum Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4
104	Dara Gadis Jelita	Layanan Hukum / Informasi	3	3	3	3	3	3	3	3	3
105	Sholahudin	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
106	Nur Khalim	Layanan Pidana	3	3	3	3	3	3	3	3	3
107	Saepah	Layanan Hukum / Informasi	3	3	3	3	3	3	3	3	3
108	Amalia Sifa Rohana	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
109	Saiful Umam	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
110	Muniroh	Layanan Pidana	3	3	3	3	3	3	3	3	3
111	Novita Setiara	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
112	Salamah	Layanan Pidana	3	3	3	3	3	3	3	3	3
113	Sutini	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
114	Matroni	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
115	Ita Novita Sari	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
116	Ariszal Prasetyo	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
117	Buyamin	Layanan Hukum / Informasi	4	3	3	3	3	3	3	3	3
118	Aditia Prasetya Hadi	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
119	Tutik Ulfa	Layanan Perdata	3	3	3	3	3	3	3	3	3
120	Nopriadi Muryanto	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4

121	Andriyanto	Layanan Hukum / Informasi	4	4	3	3	4	4	4	4	4
122	Ahmad Nafis	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
123	Sifa'ul Qulub	Layanan Hukum / Informasi	4	3	3	3	3	3	3	3	4
124	Fauzi	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
125	Asrori	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
126	Aditya Dwi A	Layanan Pidana	4	3	3	3	3	3	3	3	3
127	M.Tian Ahsanul Anam	Layanan Pidana	3	3	3	3	3	3	3	3	4
128	M.Tian Ahsanul Anam	Layanan Pidana	4	3	3	3	3	3	3	3	4
129	Fajar Dwi Utami	Layanan Pidana	4	3	3	3	3	3	3	3	3
130	Pujianto	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
131	Siti Mukayah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
132	Dewi Sartikasari	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
133	Sarnubi	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
134	Candra Becti W	Layanan Hukum / Informasi	3	3	3	3	3	3	3	3	4
135	Mahdianur	Layanan Perdata	4	3	3	3	3	3	3	3	4
136	Zaki	Layanan Pidana	4	3	3	3	3	3	3	3	3
137	Kholid Annur	Layanan Perdata	4	3	3	3	3	3	3	3	3
138	M.Fahmi Nashrallah	Layanan Hukum / Informasi	4	3	3	3	3	3	3	3	3
139	Sunarti	Layanan Pidana	4	3	3	3	3	3	3	3	3
140	Kholif Fadilla P	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
141	Ambarsari	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
142	Ayu Indriani	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
143	Sri Muzazilah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
144	Nadya Yunia M	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
145	Bety Sarinah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
146	Fuad Misbahul	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
147	Sri Wahyuningsih	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
148	Sutuni	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
149	Siti Murtiah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
150	Sunarti	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
151	Hardodo	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
152	Nabila Amalia Salsabilla	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
153	Fifiana Maisalam	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
154	Kabul Liyanto	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
155	Panji Iskandar Panca Sakti	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
156	Priyo Laksono	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
157	Andriyanto	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
158	Sri Mustamilah	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
159	Arizal Prasetyo	Layanan Hukum /	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Informasi											
160	Rasmini	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
161	Sinta Nur Hidayati	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
162	Salsabila Khadhirotul Fitri	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
163	Hevi Desri Asto Handayani	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
164	Rukati	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
165	Selvi Agustina	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
166	Siti Mukayah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
167	Ahmad Jalaluddin K	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
168	Sri Sundari Warsiti	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
169	M.Santoso	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
170	Hammam Faris Kurniawan	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
171	M.Syaiful Mujab	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
172	Fitri Yuniasasi	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
173	Siti Murtiah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
174	Erni Nur Mazidah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
175	Tio Ramadani Rizki Yunanto	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
176	Mastiah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
177	Sudarwanto	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
178	Kevin B Sibarani	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
179	Reni Silviani	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
180	Rakhmat Bowo Suharto	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
181	Selo Atdri Wibowo	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
182	Abdul Wahab	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
183	Jupriyono	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
184	Sakroni	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	3	4	4
185	Sangidun	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
186	Sri Mustamilah	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
187	Yuni Sri Astutik	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
188	Siti Murtiah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
189	Supiah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
190	M.Ali Syakbana	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
191	Ruslan	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
192	Sunarti	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
193	Sri Rahayu	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
194	Hery Ozi Kurniawan	Layanan Administrasi Umum Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4
195	Anggi Ulzana Amelia	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
196	Slamet Widodo	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
197	Nur Hidayah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4

198	Siti Mahmudah	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
199	Nanda Istiyo Perdana	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
200	Sunarsih	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
201	Nabila Amalia Salsabilla	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
202	Yeni Kurniastuti	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
203	Siti Jumiati	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
204	Lutfatul Laela	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
205	Imam Sandholi	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
206	Fajar Dwi Utami	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
207	Ari Priandanu	Layanan Administrasi Umum Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4
208	M.Faidatul Misbah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
209	Siti Mukayah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
210	Yeni Kurniastuti	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
211	Siti Murtiah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
212	Ernawati	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
213	Fauzi Nur R	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
214	Mahfuri	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
215	Panji Iskandar Panca Sakti	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
216	David Nor Efendi	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
217	Umi Kholifah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
218	Yuni Sri Astutik	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
219	M.Nazalal K	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
220	Saiful Arif Rokhman Setiawan	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
221	Supriyanti	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
222	Nurhadi	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
223	Sulastari	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
224	Rahmawati	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
225	Istirokah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
226	Sa'roni	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
227	Artdityo	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
228	Edi Suwito	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
229	Ferdi Maulana M	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
230	Esa Maharani	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
231	Fajrul Islam	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
232	Yuni Sri Astutik	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
233	Edi Siswato	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
234	Nur Hanif Prasetyo	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
235	Ayu Indriani	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
236	Kanti Prihatiari	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
237	Sri Rahayu	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
238	Kumarun Bahri	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
239	Trimono	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4

240	Dwi Liestyani	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
241	Muzaidun	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
242	Gaenaya Septiarini Y	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
243	Suci	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
244	Kasno	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
245	Fani Rahma Sari	Layanan Administrasi Umum Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4
246	Eni Safitri	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
247	Sri Setyo Astuti	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
248	Sumarno	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
249	Supriyanti	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
250	Alfiah F	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
251	Sri Rahayu	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
252	Sudarwanto	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
253	Rufiati	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
254	Irton Tabrani	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
255	Lukmanul Apriliyan W.P	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
256	Agustina Andiah Ekowati	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
257	Sri Watini	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
258	Fahmi Ainun Najib	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
259	Nur Gilang G	Layanan Administrasi Umum Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4
260	Abdullah Zaini	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
261	Trubus Ari Basuki	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
262	Uly Auliya	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
263	David Nor Effendi	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
264	Agustina Andiah Ekowati	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
265	Eka Ulfa Shofiana	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
266	Ilham Zkaria Hilmi	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
267	Ahmad Nurul Ulum	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
268	Munakhroh	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
269	Afifatul Qoimah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
270	Salamah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
271	Dwi Amin Rois	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
272	Rukati	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
273	Sulastari	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
274	Agus Kartejo	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
275	Diah Ayunita N.D	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
276	Nadya Yunia Maharani	Layanan Pidana	4	3	4	4	4	4	4	4	4
277	Hammam Faris	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4

	Kurniawan										
278	Avita Ristiani	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
279	Kasni	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
280	Alfiah Findari	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Ridho Fernanda										
281	Suryan Susanto	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
282	M.Syaiful Mujab	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
283	Ali Mashudi	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Anggi Ulzana										
284	Amelia	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
285	Sumarni	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
286	Atin Puji Lestari	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
287	Agus Slamet Riyadi	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
288	Jovan Arya Suseno	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
289	Ari Wibowo	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
290	Dwi Feri Y	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
291	Bety Sarina	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
292	Tofik Munandar	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
293	Alsha Fianatita	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
294	Falikha Ardiyani	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
295	M.Khoirul Anam	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
296	M.Fahmi N	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
297	Agus Slamet Riyadi	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
298	David Nor Efendi	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
299	Mukhlisin	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Burhannudin										
300	Khairil Umar	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
301	Dias Andriano	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
302	Dian Suminarsih	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
303	Istirokah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
304	Alfiah Findari	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
305	Kasni	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
306	Supriyanti	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
307	Sri Setyo Astuti	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
308	Wahyu Wulandari	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
309	Syariah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
310	Uly Auliya	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
311	Agus Slamet Riyadi	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
312	Imam Maturidi	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
313	Anto Prasetyo	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
314	David Pahala	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
315	Aditya Dwi A	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
316	Joko Purwoko	Layanan Hukum /	4	4	4	4	4	4	4	4	4

		Informasi									
317	Dika Anggoro	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
318	Kholid Annur	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
319	Sutarsan	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
320	Suyono	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
321	Fauzi Nur R	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
322	Arif Abdillah	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
323	Sutinah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
324	M. Imam Sukoco	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
325	M.Zamroni	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
326	Andi Supriyanto	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
327	Golek Sejati	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
328	Ahmad Sudarso	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
329	Sarnubi	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
330	Eni Sapitri	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
331	Ahmad Rofi'i	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
332	Bambang Hartono	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
333	Munawaroh	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
334	Siti Mukayah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
335	Matroni	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
336	Sudarwanto	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
337	Sulastari	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
338	Pradityo Hermawan	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
339	Sri Sundari Warsiti	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
340	Dika Anggoro	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
341	Mahdianur	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
342	Wahid Khobirujudi	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
343	Kuat Yunianton Wibowo	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
344	Sakroni	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
345	Ferry Ihda Maulana	Layanan Administrasi Umum Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4
346	Kharisma Ganis Putu	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
347	Edy Triyono	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
348	Tutik Kistrini	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
349	Diah Sarini	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
350	Sulastari	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
351	Vieri Ardi Darmawan	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
352	Salamah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
353	Sutini	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
354	Rukati	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
355	Soegihartomo	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
356	Hera Agung Rizqisari	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
357	Sholahudin	Layanan Hukum /	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Informasi											
358	Dika Anggoro	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
359	Asrori	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
360	Setia Nugroho	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
361	Saiful Hadi	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
362	Kasno	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
363	Gaenaya Septiarini Y	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
364	Purwanti	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
365	Dimas Adrian Angga S	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
366	M.Zaki Masyfu'in	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
367	Warsito	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
368	Rasmini	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
369	Sulastari	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
370	Munawaroh	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
371	Sutini	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
372	Fendi Pranata	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
373	Sakroni	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
374	Siti Ngatimah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
375	Budi Santosa	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
376	Dwi Liestyani	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
377	Dewi Sartikasari	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
378	Ahmad Suryo P	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
379	Abdul Rokhim	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
380	Maya Zulfatun Nafisah	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
381	Soegihartomo	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
382	M.Fahmi N	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
383	Ahmad Nafis	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
384	Alfin Farhana A	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
385	Ikhfa Ambarwati	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
386	Gus Hiftirul Azis	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
387	Panji Iskandar Panca Sakti	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
388	Kumarudin	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
389	Kumarudin	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
390	Panji Iskandar Panca Sakti	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
391	Tri Wulandari	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
392	M.Erzad	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
393	Yudha Angga Widiantera	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
394	Tri Ambarsari	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4

395	Inka Ayudya S	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
396	Sudarwanto	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
397	Siti Alinatun Nihayah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
398	Novi F	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
399	Ikhfa Ambarwati	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
400	Hadi Siswo Utomo	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
401	Sri Sundari Warsiti	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
402	Darsono	Layanan Administrasi Umum Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4
403	Wahono	Layanan Administrasi Umum Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4
404	Nur Maulidia	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
405	Raehan Setyo Nugroho	Layanan Administrasi Umum Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4
406	Kumarudin	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
407	Arum Sekar Oktaviana	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
408	Sakroni	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
409	Alfin Farhana Asshidiqi	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
410	Fanny Khaquunnisa	Layanan Administrasi Umum Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4
411	M.Yusrul Falakh	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
412	Nurul Asfiah	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
413	Yoyok Sakiran	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
414	Suntikno	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
415	Munawaroh	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
416	Sholahudin	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
417	Nurul Asfiah	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
418	Diah Ayu A	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
419	Nur Kasan	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
420	Fathullah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
421	Farah Aqila	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
422	Kumidaningsih	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
423	Sulastari	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
424	Siti Alinatun Nihayah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
425	Turi	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
426	Syariah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
427	Diah Ayu A	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
428	Paulina Chrisanty Situmeang	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
429	Imam Maturidi	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
430	Dian Setyo Nugroho	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
431	Dian Setyo	Layanan Hukum /	4	4	4	4	4	4	4	4	4

	Nugroho	Informasi									
432	Rika Andi Wijaya	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
433	Kumarudin	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
434	Dimas A	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
435	Marlina Yulistiyani	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
436	Wahyu Indra Cahyanto	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
437	Agus S	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
438	Umi Kholifah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
439	Siti Nurkhofifah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
440	Agus S	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
441	M.Akbar Ari M	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
442	Kholili Rohman	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
443	Kholili Rohman	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
444	M.Rokim	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
445	Denny	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
446	Eka Ratnasari	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
447	Rokani	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
448	M. Imam Sukoco	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
449	Sapna Nabila Cantika Dewi	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
450	Rufiati	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
451	Kumarudin	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
452	Rukati	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
453	Umi Ulfah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
454	Purwanti	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
455	Imam Maturidi	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
456	Sri Setyo W	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
457	Benny Arnando Rubens	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
458	M.Yusrul Falakh	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
459	Dewi Sartikasari	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
460	Tri Ambar SAR	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
461	Fitri Yuniasasi	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
462	Mutiara Dewi Pramesti	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
463	Sapna Nabila C.D	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
464	Matroni	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
465	Siti Mukayah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
466	Ayu Citra Rahmasari	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
467	Ifah Khoiriyah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
468	Murtiningsih	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
469	Nur Akhmad Faozi	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
470	Soegihartomo	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
471	Sudarwanto	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
472	Ali Rohmad	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4

473	Hindun	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
474	M.Ardhana	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
475	Budianto	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
476	Sonhaji	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
477	Azka Nisa S	Layanan Administrasi Umum Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4
478	Rian H	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
479	Lukmanul A	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
480	Novi Febriyanti	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
481	Fivi Senia	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
482	Sri Mawarsih	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
483	Surya Yolanda W	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
484	Erly Yuliana Sari	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
485	Arif Prasetyo	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
486	Dimas Oktavian R	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
487	M.Khoirul	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
488	Ahmad Suryo P	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
489	Teguh Prasetyo	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
490	Avita Ristiani	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
491	Fitriana	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
492	Desi Hartati	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
493	Mariyem	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
494	Masrochan	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
495	Etik Sutantri	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
496	Umi Munadliroh	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
497	Kholifah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
498	Sri Rahayu	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
499	Rachmat S	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
500	Pandji Pulonggono	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
501	Eva Ika Miasari	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
502	Linda Wijayanti	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
503	Joko Suwito	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
504	Amalia Perdana Putri	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
505	Deddy M.W	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
506	Siti Hanah	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
507	Paulus Budiono	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
508	Masroni	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
509	Rika Andi Wijaya	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
510	Amalia Perdana Putri	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
511	Ahmad Subkhi	Layanan Administrasi Umum Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4
512	Andriyanto	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
513	Siti Istirohah	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
514	Sri Wahyuni	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
515	Tarmuji	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4

516	M.Ardhana	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
517	Suci	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
518	David Nor E	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
519	Agus Setyaji S	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
520	Mahdianur	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
521	Abdul Khamid	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
522	Abdul Khamid	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
523	Fatkhan	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
524	Musyafak	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
525	David Nor E	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
526	Masroni	Layanan Administrasi Umum Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4
527	M.Rokim	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
528	Nalindra	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
529	Denny Ocvanus M	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
530	Sangidun	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
531	Sri W	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
532	Santi Lusiana	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
533	Niam F	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
534	Romy Aziz Risaldi	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
535	Sutikno	Layanan Administrasi Umum Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4
536	Candra	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
537	Devi Irianti	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
538	M.Farid Aminudin	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
539	Surya Irawan	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
540	Musyafak	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
541	Nuryati	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
542	Christian Sulistiawati	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
543	Husnul Hija	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
544	Dani Husada	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
545	M.Ardhana	Layanan Administrasi Umum Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4
546	Aditya	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
547	Dirwan B Manalu	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
548	Agra Sulchantifa Ulul Amri	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
549	Siti Chotimah	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
550	Kumarudin	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
551	Husnul Hija	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
552	Arif Prasetiyo	Layanan Hukum /	4	4	4	4	4	4	4	4	4

		Informasi									
553	Latifah Hanim	Layanan Administrasi Umum Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4
554	Darsono	Layanan Administrasi Umum Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4
555	Agus Setyaji S	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
556	Zaenal Abidin	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
557	Alimatur Rodiyah	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
558	Setya Hermawan	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
559	Hesty H	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
560	Sukandar	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
561	Regal Ady Pamungkas	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
562	Siti Munasiron	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
563	Jumarti	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
564	Alexander	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
565	Rian Hidayatullah	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
566	Rika Sulistyoningsih	Layanan Administrasi Umum Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4
567	Raden Joa Kansha R	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
568	Yulianiva Maulida	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
569	Tititk Murdiningsih	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
570	Jojon D.L	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
571	Sri Setyo Wahyuningrum	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
572	Abdullah Zaini	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
573	Agus S	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
574	Rian Hidayatullah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
575	Dwi Yuliana	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
576	Dwi Yuliana	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
577	Wahyu Nurmansyah	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
578	Susmiati	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
579	Novandi S	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
580	Sri Setyo Wahyuningrum	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
581	Rian Hidayatullah	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
582	Ahmad Lutfi Oktafiyanto	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
583	Husnul Hija	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN III 2026

HASIL ANALISIS DATA SKM

Berdasarkan kriteria standar nasional siSUPER

 Preview Publikasi

Ringkasan Nilai

Data Umum Responden

Domisili

Umur

Layanan

Nilai Unsur

Tindak Lanjut

NILAI INDEKS SKM

• PENGADILAN NEGERI DEMAK

3,94 / 98,45 %

 Periode: 1 Juli 2026 s/d 30 September 2026